

Wartawan Cilacap Ancam Polisikan Panwaslukada

CILACAP - Ketua Panwaslu Cilacap 2012 lalu, Sani Aryanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, kini berbalik menuding Kepala Sekretariat, Anang Sap-to.

Ketika dikonfirmasi, Sani yang kini disibukkan dengan kegiatan pencalegannya menyampaikan bahwa Kepala Sekretariat Panwaslukada saat itu adalah sebagai orang yang mengetahui secara persis adanya aliran dana yang masuk ke wartawan.

Tudingan ini dikaitkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di Panwaslukada Cilacap 2012.

LHP ini menyebut, Panwaslukada mengalirkan dana untuk wartawan meliputi kegiatan di Panwaslu yang jumlahnya Rp 64.336.500. Namun di dalamnya ada sejumlah pembiayaan lain.

Belum jelas keterangan yang diberikan oleh Sani Aryanto tersebut. Sebab pernyataan yang diberikan itu hanya melalui sambungan telepon saat salah satu wartawan mengkonfirmasi. Setelah LHP BPK muncul dan menyebut wartawan sebagai salah satu penerima dana yang menjadi temuan penyimpangan, Sani Aryanto sendiri sulit untuk dikonfirmasi.

"Itu yang mengetahui persis Kasek (kepala sekretariat)" ujar Sani singkat.

Bahkan ketika kalangan wartawan Cilacap menggeruduk kantor Panwaslu kemarin, Sani juga tak bisa dihadirkan. Hanya Kepala Sekretariat Panwaslukada, Anang Sapto yang datang menanggapi klarifikasi wartawan.

Tetapi Anang saat itu menegaskan, bahwa semua yang

menjadi temuan dari BPK bukan dalam kapasitasnya untuk memberikan tanggapan, termasuk soal adanya aliran dana ke wartawan. Ia menegaskan, dalam hal ini hanyalah ketua yakni Sani Aryanto yang memiliki kewenangan menanggapi klarifikasi.

"Jadi bukan kapasitas dan kewenangan saya untuk menanggapi, karena saya juga tidak tahu persis. Itu yang tahu Pak Ketua (Sani Aryanto)" ungkap Anang.

Di sisi lain kalangan pekerja pers baik di Cilacap maupun Banyumas terus mengejar persoalan ini karena dianggap sebagai pencemaran nama profesi. Bahkan langkah hukum bakal ditempuh untuk pemulihan citra wartawan diawali dengan akan melakukan somasi ke Panwaslukada.

■ Jalur Hukum

Berikutnya, wartawan merencanakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke kepolisian bahwa pernyataan dari Panwaslukada lewat LHP BPK tersebut sebagai sebuah perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

"Kami akan menindaklanjuti persoalan ini ke jalur hukum" ujar wartawan Harian Banyumas, Fardan Saputra.

Untuk diketahui, dari LHP BPK RI, dari enam item temuan senilai Rp 64 juta lebih mencakup biaya pengamanan kantor Sekretariat Panwaslukada dan dana sosial apabila terdapat anggota maupun staf Sekretariat Panwaslukada yang sedang mengalami musibah.

Berikutnya dana Lebaran, dana untuk wartawan meliput berita di Kantor Sekretariat Panwaslukada, pembuatan kaos untuk anggota dan staf serta jamuan bagi tamu Bawaslu Pusat maupun Bawaslu Provinsi Jateng. ■ *ady—sn*